Pembiayaan Berkelanjutan untuk Industri Konstruksi Indonesia: Perspektif ESG

Oleh:
Bagas Prakoso Ansori
NIP 23-827
Proyek Penyempurnaan Bendungan Marangkayu/Divisi Operasi 2

1. Pendahuluan

Industri konstruksi merupakan sektor vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia, memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur nasional. Namun, sektor ini juga merupakan salah satu kontributor utama terhadap dampak lingkungan negatif, termasuk emisi karbon dan limbah konstruksi. Dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keberlanjutan, industri konstruksi kini dihadapkan pada tuntutan untuk mengadopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dan bertanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, pembiayaan berkelanjutan dengan perspektif *Environmental, Social, and Governance* (ESG) muncul sebagai solusi strategis. Artikel ini akan membahas pentingnya ESG dalam industri konstruksi Indonesia, instrumen pembiayaan berkelanjutan yang tersedia, tantangan dan peluang yang ada, serta contoh nyata penerapannya di lapangan.

2. Pentingnya ESG dalam Industri Konstruksi

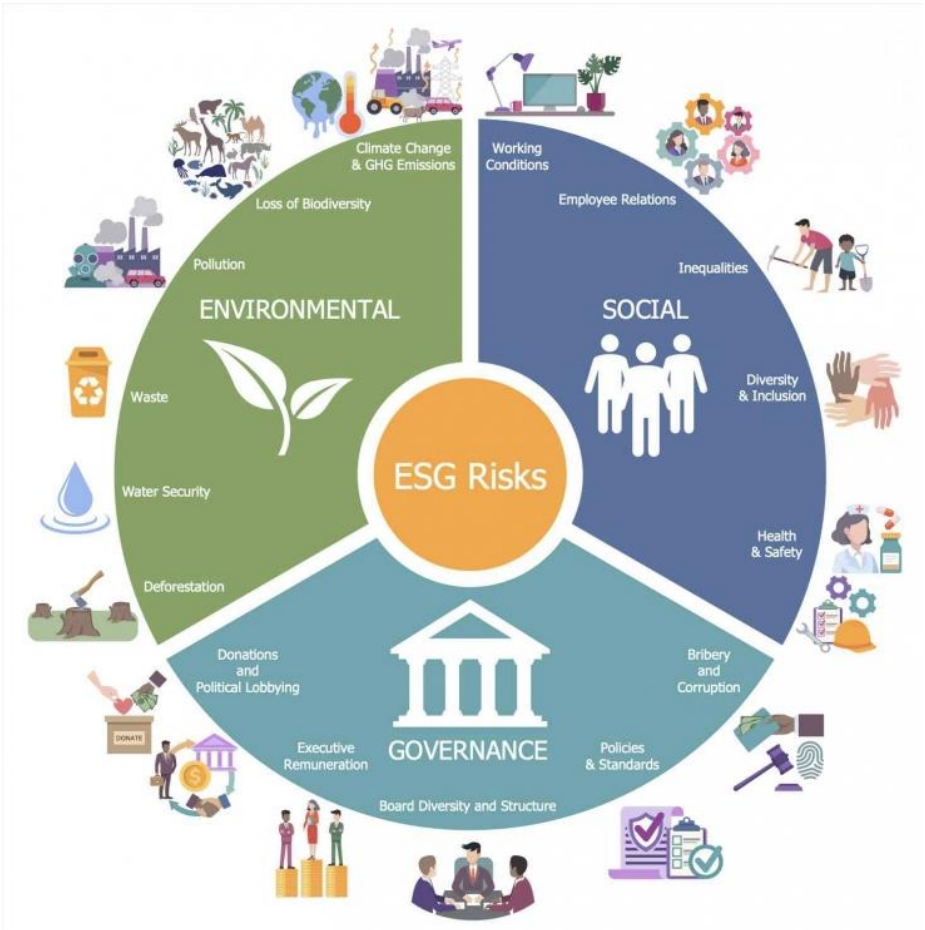

Sumber: FitraRachmandani, M. (2023)

Pembiayaan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam industri konstruksi, mengingat peran sektor ini dalam pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. Untuk memahami lebih jauh, mari kita telaah bagaimana ESG (Environmental, Social, and Governance) berperan dalam mendukung keberlanjutan di industri konstruksi Indonesia (Hanggoro, 2024).

- **Aspek Lingkungan (Environmental)**

  Aspek Lingkungan (Environmental) dalam ESG menekankan pada pengurangan dampak negatif industri konstruksi terhadap alam. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur yang masif memerlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan emisi gas rumah kaca, penggunaan material ramah lingkungan, pengelolaan limbah, dan efisiensi energi. Contoh nyata penerapan aspek lingkungan adalah proyek Green Building di Jakarta, seperti Gedung BRI II yang telah memperoleh sertifikasi LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Contoh lain, PT Brantas Abipraya, sebagai perusahaan jasa konstruksi, juga mengutamakan tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, konsumen, karyawan, dan

masyarakat, dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan serta berperan aktif dalam rencana aksi nasional tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) (Brantas Abipraya. 2023).

Sumber: Brantas Abipraya, 2023

- **Aspek Sosial (Social)**

Aspek Sosial (Social) dalam ESG berfokus pada dampak proyek konstruksi terhadap kesejahteraan pekerja dan masyarakat sekitar. Topik ini mencakup kesehatan dan keselamatan kerja, inklusi sosial, dan dampak sosial proyek terhadap komunitas lokal. Contoh yang diterapkan juga oleh PT Brantas Abipraya adalah bagaimana perusahaan berkomitmen untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui pengelolaan CSR (TJSL) yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam penyusunan program TJSL, Abipraya menyelaraskan dengan hasil pemetaan skala prioritas TPB yang merupakan komitmen dunia atas kesepakatan pembangunan berkelanjutan, guna mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.

Sumber: Brantas Abipraya Proyek Bendungan Marangkayu, 2024

- **Aspek Tata Kelola (Governance)**

  Aspek Tata Kelola (Governance) dalam ESG menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika bisnis. Tata kelola yang baik memastikan bahwa perusahaan konstruksi mematuhi regulasi, menghindari korupsi, dan menjalankan bisnis dengan integritas. Sebagaimana yang telah berusaha diterapkan oleh PT Brantas Abipraya, yang telah memiliki struktur tata kelola yang lengkap, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance). Dalam pelaksanaannya, Abipraya memiliki berbagai kebijakan dan pedoman, yang disebut dengan soft structure GCG, untuk menjalankan fungsi dan tugasnya. Tujuan membangun soft structure GCG meliputi melengkapi kebijakan pendukung dalam penerapan GCG, menjadi pedoman bagi Abipraya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai dengan budaya perusahaan yang diharapkan, serta sebagai bentuk komitmen tertulis bagi seluruh jajaran dan tingkatan organisasi dalam meningkatkan disiplin dan tanggung jawab organ perusahaan guna menjaga kepentingan pemangku kepentingan. Abipraya senantiasa membangun komunikasi dua arah dengan pemangku kepentingan melalui pertemuan berkala untuk mengetahui kebutuhan mereka dan memastikan pelaksanaan TJSL, termasuk program-program CSR, dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Perseroan tersebut bertekad menghasilkan nilai tambah yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan melalui tiga aspek berimbang: ekonomi, sosial, dan lingkungan (Brantas Abipraya, 2023).

Sumber: Brantas Abipraya, 2023

3. Pembiayaan Berkelanjutan: Instrumen dan Implementasi

Pembiayaan berkelanjutan merupakan mekanisme penting dalam mendukung proyek-proyek yang memiliki dampak positif terhadap lingkungan dan sosial. Dalam konteks industri konstruksi, pembiayaan berkelanjutan mencakup berbagai instrumen keuangan seperti obligasi hijau, pinjaman hijau, dan ekuitas hijau. Obligasi hijau digunakan untuk mengumpulkan dana yang secara eksklusif dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan infrastruktur hijau. Pinjaman hijau memberikan insentif berupa suku bunga lebih rendah bagi perusahaan yang menjalankan proyek dengan dampak lingkungan positif, sementara ekuitas hijau melibatkan investasi langsung dalam proyek atau perusahaan yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan. Implementasi pembiayaan berkelanjutan di Indonesia memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dengan memperkenalkan regulasi dan insentif untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan, seperti Roadmap Keuangan Berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Lembaga keuangan, seperti Bank Mandiri dan Bank BRI, mulai menawarkan produk-produk keuangan yang mendukung keberlanjutan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa pembiayaan berkelanjutan dapat menjadi arus utama dalam industri konstruksi Indonesia, mendorong pertumbuhan yang lebih hijau dan inklusif.

4. Tantangan dalam Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan dalam Industri Konstruksi di Indonesia

Penerapan pembiayaan berkelanjutan dalam industri konstruksi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep ESG di kalangan pelaku industri dan pemangku kepentingan. Banyak perusahaan konstruksi yang masih berfokus pada keuntungan jangka pendek dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, infrastruktur pendukung untuk pembiayaan berkelanjutan, seperti regulasi yang konsisten dan insentif fiskal, masih perlu ditingkatkan. Ketersediaan data yang akurat dan transparan tentang kinerja ESG perusahaan juga menjadi kendala, mengingat banyak perusahaan belum mengadopsi standar pelaporan ESG yang diakui secara internasional. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses terhadap teknologi hijau dan solusi inovatif yang dapat mendukung proyek konstruksi berkelanjutan, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah.

5. Peluang dalam Penerapan Pembiayaan Berkelanjutan dalam Industri Konstruksi di Indonesia

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, terdapat peluang besar dalam penerapan pembiayaan berkelanjutan di industri konstruksi Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai inisiatif dan regulasi yang mendukung keberlanjutan, seperti Roadmap Keuangan Berkelanjutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, meningkatnya permintaan investor untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan membuka peluang bagi perusahaan konstruksi untuk mendapatkan pendanaan melalui instrumen keuangan hijau seperti obligasi hijau dan pinjaman hijau. Perusahaan konstruksi yang mengadopsi praktik berkelanjutan juga dapat meraih reputasi yang lebih baik dan meningkatkan daya saing di pasar global. Teknologi dan inovasi juga menawarkan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari proyek konstruksi. Misalnya, penggunaan teknologi bangunan hijau dan material ramah lingkungan dapat menjadi daya tarik bagi investor yang berfokus pada keberlanjutan. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang ini, industri konstruksi di Indonesia dapat berkembang menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

6. Framework Pembiayaan Berkelanjutan dengan Perspektif ESG

Penetapan kebijakan dan regulasi adalah langkah pertama yang perlu diambil. Pemerintah dan regulator perlu menetapkan kebijakan yang mendukung pembiayaan berkelanjutan, termasuk insentif fiskal dan non-fiskal (SDGs Indonesia, 2024).

Lembaga keuangan perlu mengembangkan dan menawarkan produk-produk keuangan yang mendukung proyek-proyek berkelanjutan, seperti obligasi hijau, pinjaman hijau, dan ekuitas hijau. Edukasi dan pelatihan tentang ESG harus ditingkatkan untuk semua pemangku kepentingan, termasuk perusahaan konstruksi, lembaga keuangan, dan investor.

Standar pelaporan ESG perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Perusahaan perlu mengadopsi standar pelaporan yang diakui secara internasional, seperti *Global Reporting Initiative* (GRI).

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta kemitraan dengan organisasi internasional, dapat mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan. Ini adalah kunci untuk mencapai tujuan yang lebih besar dalam keberlanjutan industri konstruksi Indonesia (Indonesia Environment Energy Centre, 2023).

A. Penetapan Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan Pemerintah dan Regulasi: Pemerintah memainkan peran krusial dalam mendorong pembiayaan berkelanjutan melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung. Kebijakan fiskal seperti insentif pajak untuk proyek hijau dan regulasi lingkungan yang ketat dapat mendorong perusahaan konstruksi untuk mengadopsi prinsip ESG. Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan roadmap keuangan berkelanjutan yang bertujuan untuk mendorong sektor keuangan dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan.

Standar Nasional dan Internasional: Mengadopsi standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau ISO 14001 untuk manajemen lingkungan dapat membantu perusahaan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik ESG mereka. Standar ini menyediakan kerangka kerja yang jelas untuk pelaporan dan pengelolaan aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

B. Pengembangan Produk Keuangan Hijau

Obligasi Hijau (Green Bonds): Instrumen keuangan ini digunakan untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan secara eksklusif untuk proyek-proyek ramah lingkungan. Misalnya, proyek-proyek energi terbarukan, pengelolaan air, dan infrastruktur hijau. Di Indonesia, PT Sarana Multi

Infrastruktur (SMI) telah menerbitkan obligasi hijau untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan.

Pinjaman Hijau (Green Loans): Produk pinjaman yang memberikan insentif berupa suku bunga lebih rendah bagi proyek yang memiliki dampak lingkungan positif. Bank Negara Indonesia (BNI) telah menawarkan pinjaman hijau untuk mendukung proyek-proyek yang berfokus pada efisiensi energi dan penggunaan sumber daya yang lebih baik.

Ekuitas Hijau (Green Equity): Investasi ekuitas langsung dalam perusahaan atau proyek yang berkomitmen terhadap praktik berkelanjutan. Ini termasuk investasi dalam startup teknologi hijau atau perusahaan yang berfokus pada solusi ramah lingkungan. Mandiri Capital, misalnya, mulai mengalokasikan dana untuk perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan.

C. Edukasi dan Pelatihan

Peningkatan Kesadaran: Mengadakan seminar, workshop, dan program pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya ESG dalam pembiayaan dan operasional perusahaan konstruksi. Ini mencakup topik-topik seperti manajemen risiko lingkungan, dampak sosial dari proyek konstruksi, dan praktik tata kelola yang baik.

Pelatihan Profesional: Mengembangkan program pelatihan yang khusus dirancang untuk manajer proyek, insinyur, dan eksekutif perusahaan konstruksi tentang bagaimana mengintegrasikan prinsip ESG dalam setiap tahap proyek konstruksi. Pelatihan ini dapat mencakup penilaian dampak lingkungan, strategi mitigasi risiko sosial, dan implementasi kebijakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

D. Pelaporan dan Transparansi

Standar Pelaporan ESG: Mengadopsi standar pelaporan ESG yang diakui secara internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI) atau Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Standar ini membantu perusahaan menyusun laporan yang mencakup informasi rinci tentang kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola mereka.

Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan bahwa laporan ESG disusun secara transparan dan dapat diaudit, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kinerja perusahaan dengan akurat. Pelaporan yang baik mencakup

metrik yang jelas dan terukur serta narasi yang menjelaskan dampak dan inisiatif perusahaan dalam menerapkan prinsip ESG.

E. Kolaborasi dan Kemitraan

Kemitraan Publik-Swasta: Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting untuk mempercepat implementasi pembiayaan berkelanjutan. Pemerintah dapat menyediakan insentif dan dukungan regulatif, sementara sektor swasta menyediakan inovasi dan eksekusi proyek.

Kolaborasi dengan Lembaga Internasional: Bekerja sama dengan organisasi internasional yang berfokus pada keberlanjutan dapat membantu perusahaan mengadopsi praktik terbaik global. Misalnya, kemitraan dengan United Nations Environment Programme (UNEP) atau International Finance Corporation (IFC) dapat memberikan akses ke sumber daya, keahlian, dan pendanaan.

7. Kesimpulan

Pembiayaan berkelanjutan dengan perspektif ESG merupakan langkah strategis dan imperatif bagi industri konstruksi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG dalam operasional dan proyek-proyek mereka, perusahaan konstruksi tidak hanya akan memenuhi tuntutan regulasi dan pasar, tetapi juga berkontribusi pada perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan penguatan tata kelola perusahaan.

Transformasi ini membutuhkan komitmen dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga keuangan. Dengan bersama-sama mendorong pembiayaan berkelanjutan, industri konstruksi Indonesia dapat bergerak menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan.

Daftar Pustaka

Hanggoro, S. (2024, June 6). Pengaruh Regulasi ESG di Sektor Konstruksi. *esgindonesia.com*. https://esgindonesia.com/literasi/pengaruh-regulasi-esg-di-sektor-konstruksi/

Otoritas Jasa Keuangan. (2015). _Pedoman pembiayaan proyek bangunan gedung hijau untuk lembaga jasa keuangan_. Otoritas Jasa Keuangan. Diambil dari https://ojk.go.id/id/Documents/Pages/Keuangan-Berkelanjutan/Pedoman%20Pembiayaan%20Isi.pdf

SDGs Indonesia. (2024, February 28). *ERA BARU KEUANGAN BERKELANJUTAN - SDGS Indonesia*. SDGs Indonesia. https://sdgs.bappenas.go.id/era-baru-keuangan-berkelanjutan/

Indonesia Environment Energy Centre. (2023). ESG framework dan implementasinya dalam bisnis_. Diambil dari https://environment-indonesia.com/esg-framework-dan-implementasinya-dalam-bisnis/

FitraRachmandani, M. (2023, October 4). Climate Investment in Indonesia's ESG Framework: Analyzing ROI and SROI Halaman 1 - Kompasiana.com. *KOMPASIANA*. https://www.kompasiana.com/fitrarch/651cea66ff9c8a63ae07e1e2/climate-investment-in-indonesia-s-esg-framework-analyzing-roi-and-sroi

Brantas Abipraya. (2023). _Sustainability report 2022_. Diambil dari https://www.brantas-abipraya.co.id/sites/default/files/2023-10/Sustainability_Report2022_compressed_WK2FfT20230906141156.pdf